

BAB II

SELAYANG PANDANG PABRIK GULA SUMBERHARJO

A. Sejarah Perkembangan Kepemilikan Pabrik Gula Sumberharjo

Pabrik gula Sumberharjo merupakan salah satu pabrik gula di Pemalang yang telah menjadi saksi bisu perjalanan perjuangan bangsa dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Pabrik gula Sumberharjo terletak di desa Banjarmulya, kecamatan Pemalang. Selain pabrik gula Sumberharjo, di Pemalang juga terdapat pabrik gula yang lain yaitu pabrik gula Comal yang telah berdiri lebih dahulu dan beroperasi pada tahun 1830-an.¹ Apabila dibandingkan dengan pabrik gula Comal, pabrik gula Sumberharjo masih tergolong lebih muda karena pabrik ini baru mulai beroperasi pada tahun 1912.

Pabrik gula Sumberharjo merupakan salah satu pabrik gula dibawah PTPN Nusantara IX (Persero). Sejak didirikan sampai dengan saat ini pabrik gula Sumberharjo sudah mengalami beberapa kali perubahan bentuk perusahaan dalam status kepemilikan atau penguasaan. Pendirian pabrik gula Sumberharjo diawali dengan perencanaan pembangunan yaitu babat hutan yang dimulai pada tahun 1836. Pelaksanaan pembangunan pabrik gula dimulai tahun 1908, dan pada tahun 1912 pabrik gula Sumberharjo mulai produksi. Perkembangan tahun 1981 pabrik mengalami penambahan ketel combi, sehingga pada tahun 1984 pabrik gula Sumberharjo mengalami perubahan

¹ Hiroyosi Kano, Frans Husken, Djoko Suryo, *Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20*. Yogyakarta: Akatiga & Gadjah Mada University Press, 1996, hlm. 79

sistem karbonatasi menjadi sulfitasi² dan mengalami peningkatan kapasitas menjadi 18.300 ku/24 per jam di tahun 1996.³

Pabrik ini pada awalnya dimiliki oleh modal Belanda yaitu NHM⁴ (*Nederlandche Handels Maatschappij*) yang berkedudukan di Belanda dan wakil cabangnya berada di Surabaya. G.R. Knight menyatakan dalam perkembangannya, pabrik-pabrik gula di Karesidenan Tegal-Pekalongan saling berkompetisi untuk mendapatkan akses tenaga kerja lokal yang tersedia merupakan situasi jangka panjang. Contohnya pada awal 1900, manajemen pabrik gula Comal mengeluh karena gaji dinaikkan oleh tuntutan para pekerja yang meningkat dari pabrik-pabrik gula di sekitarnya⁵.

Kira-kira satu dekade kemudian keadaannya terbalik, dan manajemen pabrik gula Tirto (di Kabupaten Pekalongan bagian timur Karesidenan) baru dapat menghentikan gelombang tenaga kerja pergi ke perkebunan-perkebunan

² Karbonatisasi merupakan reaksi yang terjadi akibat interaksi susu kapur ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) dan gas CO_2 membentuk endapan senyawa kalsium karbonat (CaCO_3) Sehingga sistem ini menghasilkan kualitas gula putih lebih baik dari sistem sebelumnya sedangkan Sulfitasi merupakan sistem klarifikasi yang menggunakan hidrolisa kapur dan sulfur (gas) sebagai bahan pemurniannya. Pada sulfitasi bahan pengotor yang dihilangkan akan lebih rendah dibandingkan karbonatisasi

³ Lihat pada blog Pabrik Gula Sumberharjo, tersedia pada <http://pg.sumberharjo-pemalang.htm>, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.

⁴ NHM dibentuk atas dasar inisiatif raja Willem I, dalam rangka menghancurkan hegemoni komersial Inggris di Jawa. Pada kurun tersebut Inggris dengan perdagangan bebasnya memiliki armada kapal lebih dari 100, dari kapal yang berlabuh di Batavia, kapal Belanda hanya 43 buah. Oleh karena itu terdapat upaya-upaya untuk memajukan perdagangan Belanda melalui satu maskapai besar.

⁵ ARA: Comal; Vol.19. Laporan Tahunan PG Comal 1900, hlm.14. tercantum dalam J.Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia; Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES, 2000, hlm. 116.

Comal yang baru dibuka dengan menaikkan gaji. Pada waktu yang bersamaan jumlah tenaga kerja melimpah karena terlalu banyak uang tunai dan tingkat kerja yang tinggi ditawarkan oleh pabrik gula Petarukan yang baru dibuka.⁶

Indonesia menjadi wilayah jajahan Jepang pada tahun 1942-1945. Pabrik gula Sumberharjo kemudian diambil alih oleh pemerintah Jepang setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Namun sayangnya, pada saat itu pabrik gula Sumberharjo tidak digunakan untuk memproduksi gula melainkan digunakan untuk memproduksi semen, yang akan digunakan untuk keperluan Jepang sendiri.

Pabrik gula Sumberharjo pindah tangan kepada pemerintah RI setelah Indonesia merdeka, didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1946. Akan tetapi, pada saat itu pabrik gula Sumberharjo tidak dapat memproduksi gula karena pabrik mengalami kerusakan berat akibat pendudukan Jepang. Adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang terjadi antara Indonesia dan Belanda, maka pada tahun 1950 pemerintah Indonesia menyerahkan pengelolaan pabrik gula Sumberharjo kepada Belanda. Hal ini dilakukan agar pabrik gula Sumberharjo dapat berproduksi lagi dan mulai memperluas areal tanaman tebu.

Pada perkembangan selanjutnya, status kepemilikan beralih kepada pemerintah Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada SK Penguasa Militer atau Menteri Pertahanan tanggal 9 Desember 1957 No.1053/PMT/57 dan SK Menteri Pertanian 10 Desember 1957 No.229/UM/57. Sehubungan dengan

⁶ J.Thomas Lindblad, *op.cit.*, hlm. 104.

sikap pemerintah dalam menghadapi perjuangan Irian Barat dan stabilitas ekonomi nasional, maka pada tanggal 10 Desember 1957 diadakan pengambil alihan semua perusahaan perkebunan milik Belanda ke tangan Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19/1959, yang terdapat pada Lembaran Negara No.31 tahun 1959 tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Baru (PPN) yang berkedudukan di Surabaya. Pabrik gula Sumberharjo termasuk wilayah unit I Semarang dengan nama PPN Baru Perusahaan Gula Sumberharjo. PPN Sumberharjo berkedudukan di daerah Pemalang dengan modal yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 86.000.000,- lebih besar dibandingkan dengan PPN Pangka di Tegal sebesar Rp.68.000,000,- dan PPN Kalibagor di Banyumas sebesar Rp. 46.000.000,-.⁷

Pemerintah kemudian mengadakan reorganisasi pada tahun 1963 hingga ditetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah No.1/1963. Pada nomor selanjutnya berisi pembentukan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan Karung Goni (BPU PPN dan Karung Goni) dengan kantor pusat di Jakarta. Pabrik gula Sumberharjo termasuk dalam PPN Gula Jawa Tengah II disebut PPN Gula Sumberharjo.⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12/1968 Lembaran Negara No.22 Tahun 1968, BPU PPN Gula dan Karung Goni dibubarkan dan

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No 186, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2001, hlm. 14-15.

⁸ Termuat pada Lampiran Peraturan Pemerintah No.2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963: No.1-20, Jakarta: Percetakan Negara, 1968, hlm. 12.

kemudian sebagai penggantinya ditetapkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1968 menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Pemerintah mengadakan reorganisasi kembali tahun 1981 pada pabrik gula Sumberharjo dengan dikeluarkannya PP No.11/1981 tentang pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI yang berkedudukan di Solo, dan pabrik gula Sumberharjo termasuk di dalamnya.⁹

Sejalan dengan langkah pembangunan yang tertuang melalui tahapan pembangunan lima tahun, maka mulai tahun 1984 pabrik gula Sumberharjo mengubah proses pengolahan gula dari cara karbonasi menja sulfitasi. Tahun 1994 telah terjadi restukturisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa PT Perkebunan XV-XVI (Persero) masuk dalam group yang dipimpin oleh PT Perkebunan XXI-XXII (Persero). Namun dalam rangka penyederhanaan bentuk perusahaan perkebunan, maka berdasarkan SK Menteri Perkebunan No.259/kmk/.016/1996, secara administratif pada pengelolaannya di bawah Direksi PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berkedudukan di Surakarta.

⁹ Pada Lembaran Negara Republik Indonesia No.12 tahun 1981 menyebutkan mengenai penyertaan modal, persero, pertanian dan perkebunan gula. Peraturan pemerintah No.10 berisi tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero).

B. Perkembangan Industri Gula

Sejarah perkembangan pergulaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan bahan bakunya, yaitu tebu. AT Birowo membagi sejarah perkembangan pergulaan menjadi beberapa periodisasi industri gula Indonesia yang terbagi menjadi 7 (tujuh) masa atau babagan zaman, yaitu:

a) Zaman VOC Sampai Tahun 1830.

Diperkirakan sekitar abad ke-15 penanaman tebu untuk dijadikan gula pertama kali diperkenalkan oleh imigran Cina yang datang ke pulau Jawa. Pada awal abad ke-18 di pulau Jawa terdapat 140 pabrik gula.¹⁰ Sebagian besar digerakkan tenaga air, yang dimiliki 84 pengusaha, sebagian besar orang Cina. Pada tahun 1710 total produksi 2.470 Ton. Karena suplai gula semakin besar menyebabkan harga menjadi rendah, sedangkan harga beras, bahan baku tebu dan ternak cukup tinggi sehingga hal ini mengurangi “kejayaan“ industri gula. Disamping itu adanya kerusuhan dalam negeri mengakibatkan JP.Coen menerapkan pungutan pajak yang seharusnya 5% namun kenyataannya adalah 10%.

Kegagalan Van Diemen memperbaiki organisasi industri atau perusahaan gula pada tahun 1637, dan kemunduran manajemen VOC menyebabkan industri gula semakin suram, sehingga pada tahun 1776 pabrik gula yang beroperasi di Jawa tinggal 5 buah saja. Semua usaha

¹⁰ Loekman Soetrisno, *The Sugar Industry and Rural Development: the Impact of Cane Cultivation for Export on Rural Java 1830-1934*, disertasi, Cornell University, ITHACA, 1980, hlm. 19-50. Dikutip dari A.T Birowo,dkk., *Perkebunan Gula*. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Perkebunan, 1992.

untuk memperbaiki industri gula pada waktu itu tidak dapat menolong.¹¹ Pada tahun 1810 VOC bangkrut dan pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas pulau Jawa. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan penghasilan bagi kepentingan negeri Belanda sebagai penjajah.¹²

Dalam periode pemerintahan Inggris (1811-1816), Raffles berusaha untuk meningkatkan daya beli rakyat dengan menghapuskan bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat pemerasan. Hal ini disebabkan karena Inggris memandang bahwa Jawa merupakan pasar bagi industri tekstilnya yang sedang berkembang.¹³ Belanda memandang pulau Jawa sebagai sumber produksi barang-barang ekspor. Jadi dalam periode Daendels ataupun Raffles, industri gula tidak mengalami perbaikan, bahkan menjadi mundur.

b) Masa Tanam Paksa

Kurun waktu berikutnya industri gula di Jawa mulai menggeliat bangkit seiring dengan diberlakukannya *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa oleh Van den Bosch. Liberalisasi industri gula di Jawa dipasung. Semua aktivitas ekonomi (perdagangan gula) swasta dilarang dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa yang

¹¹ A.T Birowo,dkk., *Perkebunan Gula*. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Perkebunan, 1992, hlm. 10.

¹² *Ibid.*, hlm. 11.

¹³ Ibrahim Hasan, *Potret Ekonomi Gula Pasir di Indonesia*. Badan Urusan Logistik, 1984. Hlm. 37.

ditetapkan sejak tahun 1830 ini, pada dasarnya adalah suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi dari masa VOC yang berupa sistem penyerahan wajib. Pada tahun 1840, tanaman tebu hanya bisa ditanam di 13 dari 18 daerah karesidenan.

Periode tanam paksa dimulai se usai perang Jawa atau perang Diponegoro. Periode ini dimulai setelah Hindia Belanda gagal mendapatkan kompensasi biaya perang dari dua kerajaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Alasan Belanda meminta kompensasi adalah adanya Perang Jawa.¹⁴

Pusat penanaman tebu pemerintah pada waktu itu banyak terdapat di beberapa karesidenan di Jawa Timur, yaitu Pasuruan, Surabaya dan Besuki. Pada tahun itu hampir 65% panen tebu yang dihasilkan dari ketiga daerah tersebut. Selain itu, daerah penanaman tebu yang luas terdapat di daerah “karesidenan pesisir” utara Jawa Tengah, seperti Jepara, Semarang, Pekalongan, Tegal dan daerah yang ada di sebelah baratnya yaitu Cirebon.¹⁵

¹⁴ Teguh Setiawan, “Industri Gula dan Modernitas Jawa”, *Republika*, (Rabu, 5 Desember 2012), hlm. 27

¹⁵ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 59-60.

Penanaman tebu dimasukkan dalam sistem tanam paksa berdasarkan resolusi gubernur jenderal tanggal 13 Agustus 1830.¹⁶ Pada tahun 1830 Bosch mengembangkan penanaman tebu di daerah pantura Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dikelola secara profesional. Sebagian besar perusahaan keluarga diserahkan kepada para manajer profesional. Modal didukung oleh *Javasche Bank*, sedangkan manajemen inti dipegang orang-orang Eropa. Usaha-usaha penetrasi pasar dilakukan pemerintah Belanda melalui regulasi impor gula dengan memberikan potongan 15 gulden untuk setiap pembayaran cukai sebanyak 100 gulden. Tenaga kerja hampir sepenuhnya tidak dibayar alias gratis karena unsur paksaan oleh para penguasa bumiputra yang berkolaborasi dengan para penjajah.

Penyelenggaraan tanaman tebu di bawah peraturan pemerintah setelah 1830 dipusatkan pada perjanjian-perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak dilakukan pada dua tahapan untuk dua aspek produksi gula yang terpisah. Kontrak tahap pertama dibuat oleh pemerintah lokal dengan desa dan tujuannya adalah mengatur penanaman tebu di bagian tertentu tanah desa, memelihara serta menebang tebu dan mengangkut tebu ke pabrik. Tahapan kontrak lainnya adalah antara pemerintah lokal yang diwakili pejabat Belanda dengan operator (pengusaha) penggilingan gula yang dengan pinjaman uang pemerintah membangun pabrik, mengolah tebu,

¹⁶ S. Van Deventer Js., *Bijdragen tot de kennis van het landdelijk stelsel op Java*, II (Zalt-Bommel: Norman, 1866), hlm. 164-165. Dalam buku tulisan dari Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2003, hlm. 39.

dan menyerahkan gula kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan.¹⁷

c) Masa Industri Gula Bebas dan maju pesat.

Penghapusan sistem tanam paksa mengakibatkan terjadinya masa pertumbuhan industri gula yang pesat. Sekitar tahun 1870, sejalan dengan perkembangan faham liberalisme di Eropa dan muncul aliran yang menginginkan dilaksanakannya politik etis di daerah jajahan sehingga terjadi perubahan politik penjajahan Belanda di Indonesia. Timbul keinginan untuk menswastakan perusahaan-perusahaan pemerintah dan penghapusan sistem tanam paksa.¹⁸

Diawali kemenangan kelompok liberal di parlemen Belanda. Pemerintah Hindia-Belanda dipaksa meliberalisasi tanah-tanah pertanian di Jawa. Pemerintah kemudian mengeluarkan *Agrarische Wet* atau Undang-Undang Agraria.¹⁹ Pada tahun 1870 *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) disahkan, yang menghapuskan tanam paksa, antara lain mengenai tebu.

¹⁷ Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2003, hlm. 40.

¹⁸ A.T Birowo, *op.cit.*, hlm. 13.

¹⁹ Teguh Setiawan, *op.cit.*, hlm. 27.

Dengan keluarnya UU Agraria dan UU Gula pada 1870 perekonomian Nusantara resmi beralih dari sistem tanam paksa yang bersifat merkantilis ke sistem usaha bebas yang bersifat liberal.²⁰ Di bawah kedua UU itulah untuk pertama kali ditata hak-hak pemilikan (*property rights*) di Nusantara terutama tanah dan modal yang harus ada dalam perkembangan ekonomi liberal.

Terbentuknya UU Agraria dan UU Gula pada tahun 1870 merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting bagi Indonesia, khususnya bagi perkembangan Industri pergulaan. Setelah itu, pemerintah membangun prasarana baru dalam bidang transportasi dan komunikasi. Dalam 30 tahun sejak UU Agraria-Jawa khususnya, berhasil tidak hanya di bidang pertanian beragam tanaman baru (*multicrops*), tetapi juga perdagangan, manufaktur, dan jasa yang luas dan modern. Manufaktur mengolah bahan primer, baik pertanian (terutama gula) maupun tambang (terutama minyak bumi). Perkembangan sektor pertanian, manufaktur, dan sektor lainnya tampak demikian hebat sehingga Hindia-Belanda dianggap tak ada duanya di Asia dalam menuju perekonomian modern (industri).²¹

d) Masa depresi sampai tahun 1940

Depresi ekonomi dunia yang terjadi setelah tahun 1930 sampai tahun 1936 menyebabkan industri gula di Indonesia terpukul. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh meningkatnya produksi gula, seperti India.

²⁰ Parakitri T.Simbolon, *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, hlm. 152.

²¹ *Ibid.*, hlm. 163-164.

Menurunnya impor gula oleh Inggris, Cina dan Jepang dengan alasan-alasan tersendiri yaitu bea impor gula yang tinggi oleh kedua negara tersebut terakhir, dan berkembangnya industri gula di Formosa (Taiwan) oleh Jepang.

e) Zaman Jepang.

Pada waktu pendudukan Jepang (1942-1945) penanaman tebu dibatasi, bahkan di beberapa daerah dilarang sama sekali. Rakyat diharuskan menanam padi dan tanaman lainnya untuk memenuhi keperluan Jepang. Pada waktu itu banyak pabrik gula yang fungsinya diubah, misalnya menjadi pabrik *butyl alcohol* (antara lain pabrik gula Gending), pabrik tekstil, pabrik pupuk, pabrik amunisi dan sebagainya. Menurut Takeshita, salah seorang bekas Direktur P3GI yang masih hidup, pabrik gula yang beroperasi waktu itu 20 buah dengan tujuh orang staf, diantaranya 6 manager perusahaan bangsa Indonesia, salah seorang diantaranya diangkat sebagai *Commissioner of Java* di Surabaya.²²

Balai penelitian gula di Pasuruan juga mendapat perhatian, sehingga penelitian tidak berhenti. Pada waktu itu di datangkan para peneliti Jepang dari Taiwan, antara lain Dr. Y. Okada sebagai direktur, Dr. Shosuke sebagai Asisten Direktur Bidang Kimia, dan T. Takeshita sebagai Asisten Bidang Agronomi. Gula yang diproduksi terutama untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang dan selebihnya untuk konsumsi setempat.

²² Parakitri T. Simbolon, *op.cit.*, hlm. 15.

f) Masa Kurun Waktu Tahun 1945-1950

Perkembangan industri gula pada tahun 1945-1950 sangat sedikit data yang dijumpai tentang industri gula. Perusahaan Belanda tetap menjadi pemilik pabrik gula, sedangkan petani di Jawa diperlukan untuk mendapatkan tanah sewa bagi pabrik gula. Pada tahun 1950 beroperasi 30 pabrik gula dengan produksi 259.771 ton dari luas areal 27.783 ha dan produktivitas 9,4 ton/ha.

g) Zaman setelah ambil alih-sekarang.

Pada tanggal 10 desember 1957 seluruh perusahaan Belanda diambil alih oleh pemerintah RI termasuk perusahaan-perusahaan gula. Perusahaan-perusahaan itu kemudian dijadikan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) baru, dengan perwakilan-perwakilan di daerah. Corak administrasi masih mengikuti cara masing-masing perusahann Belanda.

Pemerintah kemudian mengeluarkan UU Nasionalisasi tahun 1957. Sebagai pelaksanaan UU tersebut diadakan reorganisasi dalam tubuh PPN baru. Semula dibentuk unit yang kemudian menjadi unit-unit menurut Rayon. Organisasi tersebut diperbaiki melalui pembentukan empat Badan Pimpinan Umum Perusahan Perkebunan Negara (BPU-PPN) karet, gula, tembakau, dan aneka tanaman.

Reorganisasi yang diadakan pada tahun 1968 melahirkan 28 Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Setelah melalui penilaian tentang asset dan kemampuan finansial, maka PNP-PNP dijadikan Perusahaan Terbatas Perkebunan Persero (PT Perkebunan /PTP) dan sekaligus

diadakan penggabungan-penggabungan seperti yang ada pada saat ini.

Tugas PT adalah:

- a. Menghasilkan devisa maupun rupiah bagi negara dengan cara seefisien mungkin.
- b. Memenuhi fungsi sosial, diantaranya menciptakan atau menambah lapangan kerja baru bagi warga negara Indonesia.
- c. Memelihara kekayaan alam, berupa pemeliharaan, peningkatan kesuburan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sejak tahun 1955 sampai tahun 1987 telah dibangun 14 pabrik gula baru, yaitu pabrik gula Madukismo (1955), pabrik gula Jatitujuh, Subang, Cot Girek, Bone, Gunung Madu, Sei Semayang, Kuala Madu, Cinta manis, Bunga Mayang, Talakar, Camming. Pelaihari, Gula Putih Mataram. Sementara itu pabrik gula Cot Girek, karena kesukaran lahan untuk tebu , maka sejak tahun 1987 ditiadakan.²³

C. Produksi dan Kinerja Pabrik Gula

1). Struktur Manajemen

Hirarki organisasi tenaga kerja, secara umum dapat dibagi mejadi empat, yaitu administratur, pegawai staf, pegawai non staf, dan buruh/pekerja perkebunan. Masing-masing bagian tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang tegas. Seorang administratur adalah pucuk pimpinan satu unit perkebunan, dan dibantu oleh penasehat dan kontraktor yang masuk

²³ *Ibid.*, hlm. 17.

pegawai staf. Seorang kontraktor membawahi beberapa kepala bagian dan seorang kepala bagian membawahi seorang asisten yang diberi wewenang di lapangan (lokasi perkebunan). Seorang asisten dibantu oleh beberapa orang mandor yang mengawasi bagian-bagian produksi dan merupakan pegawai non-staf. Hirarki yang paling bawah adalah buruh atau pekerja perkebunan.²⁴

Hubungan masing-masing tingkat kepegawaian tersebut dipisah dengan jelas dan kaku oleh status dan sistem upah. Seorang buruh/ pekerja tidak dimungkinkan menjadi mandor, karena mandor dipilih atas dasar kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Demikian pula pegawai non-staf menjadi pegawai staf jarang terjadi karena hubungan dalam struktur organisasi perkebunan bersifat partenalistik dan otoriter.

Struktur organisasi pabrik gula Sumberharjo menggunakan tipe garis dan staff. Pabrik gula Sumberharjo dipimpin oleh administrator yang bertanggung jawab kepada direksi utama yang dibantu oleh beberapa kepala bagian dan staff. Adapun tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut: Administrator dalam melaksanakan tugas rutin teknis maupun administratif, administrator bertanggung jawab kepada direksi menurut fungsinya. Sedangkan dalam lingkup pabrik administrator bertanggung jawab atas semua bidang kegiatan pabrik gula. Administrator membawahi empat Kepala bagian, meliputi: Kepala bagian tanaman,

²⁴ Hal ini merupakan pandangan dari Mubyarto, dkk dalam bukunya *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*.

Kepala bagian tata usaha dan keuangan (TUK), Kepala bagian pengolahan/ pabrikasi serta kepala bagian Instalasi.²⁵

2) Kinerja Pabrik Gula Sumberharjo

Perkembangan pabrik gula Sumberharjo memang sudah tidak diragukan lagi keeksistensiannya, buktinya pabrik ini masih saja menggiling dari zaman kolonial belanda hingga sekarang, walaupun pada masa pendudukan Jepang pabrik gula ini sempat diambil alih oleh pemerintah Jepang. Bahkan telah dialih fungsikan menjadi tempat untuk memproduksi semen yang kesemuanya itu adalah demi memenuhi kepentingan dari pemerintah Jepang.

a) Lahan dan Perusahaan Pengelola

Menurut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pematang yang berperan dalam kegiatan BIMAS No: 521.1/ 696/ 86/ EK Tgl.30 Juni 1986 tentang pedoman pelaksanaan program tebu rakyat intensifikasi (TRI) musim tanam 1986-1987 menyebutkan pada pasal mengenai lahan dan perusahaan pengelola yang memaparkan bahwa pertanaman TRI diselenggarakan di wilayah kerja pabrik gula yang wilayahnya merupakan kesatuan operasional yang meliputi: a) lahan yang berada sekitar dan relatif dekat dengan lokasi pabrik gula yang

²⁵ Seperti yang dijelaskan oleh bapak Bambang Krisnanto yang telah mempunyai asam garam di pabrik gula Sumberharjo sejak tahun 1982. 1982-1991 memulai karirnya sebagai karyawan di bagian stasiun puteran hingga di tahun 1992-sekarang di bagian kantor administrasi instalasi.

memenuhi persyaratan teknis untuk tanaman tebu dan tidak menghadapi resiko banjir serta bencana alam. b) pengaturan tata tanam untuk memperoleh rendemen optimum di dalam memenuhi gilir tebang. c) pengaturan tata tanam dan gilir tebang sesuai dengan masa gilir optimum dan kapasitas giling pabrik gula yang bersangkutan.²⁶

Berdasarkan kapasitas giling pabrik gula, maka tanaman TRI di kabupaten Pemalang akan digiling dengan masa giling yang optimal. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Dati II Pemalang mengadakan monitoring dan langkah pengamanan untuk dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ayat kedua menyatakan bahwa dalam pelaksanaan TRI pabrik gula merupakan perusahaan pengelola yang berkewajiban membina petani peserta TRI di dalam wilayah kerjanya, dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam pasal 20. Lahan yang dipergunakan untuk menanam tebu berupa lahan sawah dan lahan tegalan, baik yang diusahakan sendiri oleh pabrik gula Sumberharjo maupun lahan petani yang mengikuti program TRI.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi penurunan luas areal tanaman tebu terutama pada lahan sawah. Hal ini disebabkan adanya alasan keengganan para petani tebu menanam tebu di lahan sawah. Alasannya adalah keuntungan yang diperoleh dari pengusahaan tebu lebih kecil apabila dibandingkan tanaman kompetitifnya yaitu padi.

²⁶ Satuan Pelaksana Koordinasi BIKAS Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, *Pedoman Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) Musim Tanam 1986/1987*. Pemalang, 1986, hlm. 6.

Dengan adanya peristiwa itu, maka pihak perusahaan pabrik gula Sumberharjo mempunyai ide untuk mengatasi hal tersebut. Pabrik gula melakukan sewa tanah pada lahan sawah agar tidak terjadi kekurangan bahan baku pada waktu proses produksi.²⁷

Sewa tanah dilakukan atas perjanjian dengan petani pemilik lahan dengan pabrik gula Sumberharjo. Pabrik-pabrik gula di Pantura kebanyakan menerapkan sistem ini, yang biasa disebut dengan sistem Km A atau kemitraan A. Sistem ini memberlakukan sewa tanah yang diterapkan oleh pabrik gula Sumberharjo, dan pabrik gula bertanggung jawab atas biaya produksi.²⁸

Penurunan luas areal tanaman tebu baik lahan sawah maupun lahan kering menunjukkan minat petani yang semakin rendah terhadap pengusahaan tebu dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri. Apalagi sejak dicabutnya Inpres No.9 tahun 1975 menjadikan petani bebas menetapkan pilihan sesuka hati terhadap komoditi apasaja yang dirasa lebih menguntungkan petani, sehingga pada tahun 1997-1998 penurunan luas areal tebu di beberapa daerah khususnya Pematang sangat terlihat. Berikut adalah perkembangan luas wilayah areal TRIS di pabrik gula Sumberharjo pada tahun 1986/1987 hingga tahun 1989-1990.

²⁷ Merupakan hasil wawancara dengan bapak Nurcahyo Bayu Aji, Kepala bidang pembukuan pabrik gula Sumberharjo pada tanggal 10 Desember 2012.

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nurharyanto pada kantor TUK.

Tabel 1

Luas Wilayah Areal TRIS (Ha) pada MTT Tahun 1986/1987-1989/1990
Wilayah Kerja di Kecamatan Pemalang, Kab.Pemalang

No	Kecamatan/Desa	Luas Penanaman TRIS			Rata-rata
		1986/1987	1988/1989	1989/1990	
1	wilayah Pemalang				
	Sewaka	72,284	52,842	62	62,37
	Kebondalem	85,032	140,1	0	75,04
	Kramat	83,728	125,093	176,945	128,58
	Saradan	43,875	42,985	50,536	45,79
	Paduraksa	32,87	22	23	25,95
	Mengori	81,415	76,075	89,682	82,39
	Surajaya	0	0	9	3
	Bojongbata	47,926	47	25,965	40,297
	Tambakrejo	58,91	226	142	142,30
	Banjarmulya	111,947	113,74	344,434	190,04
	Pegongsoran	18,145	7,83	0	8,65
	Bojongnangka	94,15	108,378	95	99,176
	Pelutan	0	0	0	0
	Mulyoharjo	41,11	0	0	13,70
	Sugihwaras	0	0	0	0
	Lawangrejo	26	0	0	8,66
	Wanamulya	99,182	102,667	170,915	124,25
	Sungapan	16	18,261	20,245	18,16
	Danasari	0	0	0	0
	Widuri	0	0	0	0

Sumber: Badan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang, diringkas dan diolah dari Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang No.521.1/696/86, No.525.2/119/88, No.525.2/474/89.

Luas wilayah TRIS dalam Masa Tebu Tanam tahun 1986/1987-1989/1990 secara garis besar paling banyak ditanam di daerah Banjarmulya. Hal ini disebabkan dekatnya lokasi dengan pabrik gula Sumberharjo, sehingga desa ini menduduki peringkat satu dalam

Kecamatan Pemalang sebagai desa yang mempunyai luas paling besar yaitu rata-rata 190,04 hektar. Sektor perekonomian desa-desa di dekat pabrik gula Sumberharjo memang bertumpu pada sektor pertanian, khususnya komoditi tebu, disetiap tahunnya desa ini mengalami peningkatan yang kuat, bila diprosentasekan tahun 1989/1990 mengalami kenaikan sebesar 202,8%. Peringkat kedua dalam kecamatan Pemalang ini ditempati oleh desa Tambakrejo, disusul desa Kramat dan Wanamulya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pabrik gula Sumberharjo membawa pengaruh ekonomi terhadap desa-desa disekitarnya seperti Banjarmulya, Wanamulya, Tambakrejo dan Kramat. Keberadaan pabrik gula kemudian menimbulkan dinamika sosial ekonomi di desa-desa itu.

Desa-desa seperti Pelutan, di era 1998-an telah menjadi sebuah desa kota yang ramai dihuni oleh masyarakat kota Pemalang. Perkembangan desa ini memang cukup pesat mengingat desa Pelutan terletak di dekat alun-alun kota, sehingga sangat jarang untuk digunakan sebagai lahan pertanian tebu. Begitu pula dengan desa Kebondalem, Mulyoharjo, Pegongsoran pada era yang sama telah menjadi salah satu desa kota menginjak akhir abad ke-19. Letak ketiga desa ini tak jauh dari alun-alun, atau tepatnya adalah pusat kota Pemalang. Dekat desa kota Kebondalem dan Mulyoharjo juga terdapat

Kampung Arab, dan *Pecinan*.²⁹ Namun demikian, di tahun 1986-1989 masih terlihat bahwa desa itu masih menanam tebu sebagai tonggak perekonomian masyarakat kala itu.

Tabel 2
Luas Wilayah Areal TRIS (Ha) pada MTT Tahun 1986/1987-1989/1990
Wilayah Kerja di Kecamatan Taman, Kab.Pemalang

No	Kecamatan/ Desa	Luas Penanaman TRIS			Rata- rata
		1986/ 1987	1988/ 1989	1989/ 1990	
2	Wilayah Taman				
	Wanarejan	46,652	48,064	0	31,57
	Beji	57	56,628	0	37,87
	Pedurungan	46	49,5	65,398	53,63
	Taman	50,794	45,117	0	31,97
	Kaligelang	27,719	49	0	25,57
	Banjardawa	26	0	0	8,67
	Benjaran	56,893	54	64,535	58,47
	Cibelok	37,511	80	69	62,17
	Jebed	113,842	54	89,186	85,67
	Sukowangi	57	24,5	88,936	56,81
	Penggarit	80,607	45,757	45,963	57,44
	Pener	66	68	59	64,33
	Jrakah	24	24	60,783	36,26
	Gondang	0	0	53,07	17,69
	Asemtoyong'	39,812	0	0	13,27
	Kabunan	68,058	83,17	0	50,40
	Kedungbanjar	86,639	42,998	93,543	74,39
	Sitemu	11,686	0	50,134	20,60
	Kejambon	15,068	32,068	30	25,71

Sumber: Arsip Daerah Kabupaten Pemalang

²⁹ Kampung Arab, dan kampung Pecinan tidak hanya dijumpai pada kota-kota besar seperti Semarang saja. Kota kecil seperti Pemalang juga di jumpai adanya Kampung Arab yang dihuni oleh mayoritas orang-orang Pemalang keturunan Arab, yang kebanyakan dari mereka banyak berbisnis *furniture* atau mebel. Kampung Arab yang dihuni oleh mayoritas orang Pemalang keturunan Arab berada di sebelah timur desa kota Kebondalem dekat Mulyoharjo sebelah utara, sedangkan orang-orang Pecinan banyak dari mereka yang mendirikan toko-toko di sekitar jalan Jenderal Sudirman layaknya toko Basa yang menjual peralatan sekolah, toko Emas, toko bahan sembako, dan lain sebagainya.

Luas area tebu di kecamatan Taman yang paling banyak di tanami komoditi tebu berada di desa Jebed dan desa Kedungbanjar. Desa yang mempunyai luas areal tebu tersempit berada di desa Asemdayong dan Banjardawa yang masing-masing rata-rata sebesar 13,27 hektar dan 8,67 hektar.

Tabel 3
Luas Wilayah Areal TRIS (Ha) pada MTT Tahun 1986/1987-1989/1990
Wilayah Kerja di Kecamatan Petarukan dan Ampelgading,
Kab.Pemalang

Kecamatan/ Desa	Luas Penanaman TRIS		
	1986/ 1987	1988/ 1989	1989/ 1990
Wil.Petarukan & Ampelgading			
Serang	66,344	65,98	69,948
Kendalsari	56,58	29	32
Petarukan	40	0	0
Tegalsari	112,669		130,78
Sukowati	0	0	10

Sumber: Badan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang, diolah dari Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang No.521.1/696/86, No.525.2/119/88, No.525.2/474/89.

Dari dalam 3 tabel diatas dapat dilihat luas areal tebu yang dimiliki oleh pabrik gula Sumberharjo yang berada di 4 wilayah kecamatan yakni kecamatan Pemalang yang meliputi 20 desa, dari beberapa desa tersebut terdapat 2 desa yakni Pelutan dan Sugihwaras yang tidak ditanami tebu. Pada kecamatan Taman cenderung ditanami tebu untuk kesemua desa, walaupun pada perkembangan selanjutnya terdapat desa yang berhenti memasok tebu yaitu desa Banjardawa, Asemdayong dan

Gondang yang berhenti di tahun 1988/1989 dan tahun 1989/1990. Untuk desa yang mulai berhenti menanam tebu di tahun 1989/1990 adalah desa Wanarejan, Beji, Taman, Kaligelang dan desa Kabunan.

Kecamatan berikutnya adalah kecamatan Petarukan, terdapat tiga desa yang ditanami tebu yakni desa Serang, Kendalsari dan Petarukan namun pada perkembangannya di tahun 1989/1990 Petarukan mulai berhenti. Untuk kecamatan Ampelgading hanya terdapat 2 (dua) desa yang ditanami TRIS yakni desa Tegal sari dan desa Sukowati

Tabel 4
Luas (Ha) Tanaman Tebu Kabupaten Pemalang tahun 1991-1996

No	Kecamatan	Tahun				
		1991	1993*)	1992	1994	1996*)
1	Moga	88		18	0	
2	Pulosari	0		0	0	
3	Belik	30		0	0	
4	Watukumpul	30		0	0	
5	Bodeh	85,359		0	318,876	
6	Bantarbolang	461,42		122	0	
7	Randudongkal	249		87	0	
8	Pemalang	1.357,99		1.894	1.580,24	
9	Taman	794,849		754	727,15	
10	Petarukan	128,229		1.099	1.200,69	
11	Ampelgading	152,919		593	746,27	
12	Comal	0		168	169,85	
13	Ulujami	0		0	156,4	
TOTAL		3.377,76	5.102,37	4.735	4.899,50	3.890,33

Sumber: Badan Arsip Daerah dan BPS Kabupaten Pemalang. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang, No.520/862/1990 dan Kabupaten Pemalang dalam Angka 1992,1994,1996.

*) tidak disebutkan secara rinci.

b) Produksi Gula

Pada umumnya secara garis besar proses pengolahan gula menggunakan proses secara fisis, hanya pada unit pemurnian yang menggunakan proses kimia. Berikut disajikan data mengenai produksi perkebunan rakyat di kabupaten Pemalang pada tahun 1992-1996. Dapat dilihat fluktuatif produksi dari tahun 1992. Penurunan terjadi di tahun 1993 dan kemudian tahun 1994 meningkat tajam sebelum akhirnya anjlok kembali di tahun 1996.

Tabel 5
Produksi Perkebunan Tebu Rakyat di Kabupaten Pemalang Tahun 1992-1996

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			
		1992	1993*)	1994	1996*)
1	Moga	129		0	
2	Pulosari	0		0	
3	Belik	0		0	
4	Watukumpul	0		0	
5	Bodeh	0		41.539,35	
6	Bantarbolang	867		0	
7	Randudongkal	87		0	
8	Pemalang	13.401		119.736,80	
9	Taman	5.339		65.615	
10	Petarukan	7.779		97.408,17	
11	Ampelgading	4.199		60.387,69	
12	Comal	11.191		13.841,29	
13	Ulujami	0		12.708,68	
TOTAL		42.992,00	37.015	411.236,98	280.377,91

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang dalam Angka 1992,1994,1996.

*) tidak disebutkan secara rinci

Tabel 6
Jumlah Kuintal Tebu (Ton)

Katagori	Jumlah kuintal tebu				
	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
TSS I	-	-	405	1.414	611
TSS II	633	-	2.467	1.760	1.957
TST I	-	5.209	-	-	-
TST II	-	-	5.429	-	-
TST I / HGU	13.099	27.845	24.597	37.565	18.689
TST II / HGU	10.504	28.551	53.955	49.639	38.504
TSSB	11.593	6.364	1.675	2.145	1.460
Jumlah TS	35.829	67.969	88.528	92.523	61.221
TRS I Km A	1.022.531	640.167	967.118	876.719	1.000.020
TRS II Km A	932.743	963.895	858.177	1.023.834	631.065
TRT I Km A	65.217	46.405	-	-	-
TRT II Km A	52.205	58.624	-	-	-
Jumlah Km A	2.072.696	1.709.091	1.825.295	1.900.553	1.631.085
TRS I K	949	-	-	29.391	14.369
TRS II K	10.267	25.501	62.829	114.338	307.384
TRT I K	36.244	79.541	86.117	126.931	142.430
TRT II K	204.939	226.830	366.238	504.647	382.649
Jumlah Km B	252.399	331.872	515.184	775.307	846.832

Sumber: Arsip Pabrik Gula Sumberharjo, Bagian Tanaman dan Pengolahan

Pada tabel 6 juga dipaparkan jumlah kuintal tebu (ton) dari tahun 2001 hingga tahun 2005. Jumlah kuintal tebu pada sistem Km A dapat dilihat perkembangan dari tahun ke tahunnya mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kuintal tebu pada sistem Km B yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah kuintal tebu per ton dari tahun 2001 hingga tahun 2005. Pabrik gula Sumberharjo mempunyai tebu sendiri yang dikelola oleh pihak pabrik. Jumlah Tebu Sendiri (TS) dari tahun 2001 hingga tahun 2004 selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2005 mengalami penurunan.

Jumlah tebu sendiri terbesar berada di tahun 2004 sebesar 92.523 ton. Berbeda dengan jumlah kuintal tebu yang dihasilkan dari sistem “Kemitraan A” mempunyai jumlah terbesar yaitu 2.072.696 ton dan mengalami kemunduran di tahun 2000. Jumlah kuintal tebu yang dihasilkan dari kemitraan A tidak sebaik pada kemitraan B yang rata-rata jumlah kuintal dari semakin meningkat saja.